

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA: AKOMODASI KEPENTINGAN WARGA TERDAMPAK BANJIR DI DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI KABUPATEN BEKASI

Eva Oktavia<sup>1</sup>, Eka Yulyana<sup>2</sup>, Sopyan Resmana Adiarsa<sup>3</sup>  
[2210631180011@student.unsika.ac.id](mailto:2210631180011@student.unsika.ac.id)<sup>1</sup>, [eka.yulyana@fisip.unsika.ac.id](mailto:eka.yulyana@fisip.unsika.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sopyan.resmanaadiarsa@fisip.unsika.ac.id](mailto:sopyan.resmanaadiarsa@fisip.unsika.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, khususnya terkait akomodasi kepentingan warga terdampak banjir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari pemerintahan desa dan warga terdampak banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berlangsung melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, dan Musrenbangdes. Pemerintah desa telah mengakomodasi aspirasi warga melalui pembangunan tanggul sementara, perbaikan drainase, dan penyusunan prioritas pembangunan, namun keterbatasan kewenangan dan anggaran menyebabkan tidak seluruh usulan dapat direalisasikan. Berdasarkan Teori Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori degrees of tokenism, khususnya consultation dan placation, dengan kecenderungan menuju partnership.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa, Banjir, Tangga Partisipasi Arnstein.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze community participation in development planning in Sukamekar Village, Sukawangi District, Bekasi Regency, specifically regarding the accommodation of the interests of flood-affected residents. The research used a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies with informants from the village government and flood-affected residents. The results indicate that community participation took place through hamlet deliberations, village deliberations, and the Village Development Planning Forum (Musrenbangdes). The village government has accommodated residents' aspirations by constructing temporary embankments, improving drainage, and establishing development priorities. However, limited authority and budget have prevented all proposals from being realized. Based on Sherry R. Arnstein's Ladder of Participation Theory, the level of community participation falls into the category of degrees of tokenism, specifically consultation and placation, with a tendency toward partnership.*

**Keywords:** Community Participation, Village Development Planning, Flooding, Arnstein's Ladder Of Participation.

### PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembangunan yang demokratis. Dalam paradigma pembangunan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang hanya menerima manfaat dari kebijakan pemerintah, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Ginting et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat memperoleh landasan yang semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri serta menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses pembangunan desa. Melalui berbagai forum musyawarah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan usulan pembangunan yang dianggap penting bagi kehidupan mereka (Eko, 2014).

Meskipun demikian, dalam praktiknya partisipasi masyarakat sering kali menghadapi berbagai kendala. Tidak semua bentuk keterlibatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang substansial. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya dilibatkan secara formal sebagai peserta musyawarah tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi yang ideal dengan praktik partisipasi yang terjadi di lapangan (Nugraheni & Pargito, 2025).

Fenomena tersebut juga dijumpai di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Desa ini merupakan salah satu wilayah yang setiap tahun mengalami banjir akibat luapan Sungai Bekasi dan Sungai CBL. Banjir yang terjadi hampir setiap tahun tersebut menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, seperti kerusakan rumah, terganggunya aktivitas ekonomi, rusaknya infrastruktur lingkungan, serta terganggunya akses pelayanan publik.

Kondisi tersebut menempatkan persoalan banjir menjadi salah satu isu utama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Masyarakat terdampak banjir secara aktif menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan tanggul, normalisasi saluran air, perbaikan drainase, serta peninggian jalan lingkungan. Namun demikian, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat tersebut benar-benar diakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa dan bagaimana posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein (1969) sebagai pisau analisis. Teori ini memandang partisipasi bukan sekadar kehadiran masyarakat dalam forum formal, tetapi sebagai bentuk distribusi kekuasaan yang memungkinkan masyarakat memengaruhi keputusan publik. Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses partisipasi masyarakat, bentuk akomodasi kepentingan warga terdampak banjir, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Sukamekar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam konteks kehidupan nyata.

Desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara rinci proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang terjadi di Desa Sukamekar. Lokasi penelitian berada di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa tersebut merupakan wilayah yang secara rutin mengalami banjir dan memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa, BPD, serta warga terdampak banjir. Data sekunder diperoleh dari dokumen RPJMDes, RKPDes, laporan pembangunan desa, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengorganisasian data, pattern matching, explanation building, dan penarikan kesimpulan (Yin,2023). Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Sukamekar dilaksanakan melalui mekanisme yang berjenjang. Proses partisipasi dimulai dari tingkat RT dan RW, dilanjutkan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Mekanisme berjenjang ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan keluhan utama mereka, khususnya mengenai bencana tahunan, seperti yang diungkapkan berikut :

“Setiap musrenbang pasti masyarakat dilibatkan. Biasanya sebelum Musrenbang desa ada musyawarah dusun dulu supaya warga bisa Menyampaikan kebutuhan di lingkungannya masing-masing. Masalah Banjir hampir selalu jadi pembahasan utama karena memang paling dirasakan warga.”

(wawancara oleh Bapak AR selaku Ketua BPD pada 28 April 2026)

Melalui forum-forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Persoalan banjir menjadi isu yang paling dominan karena secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Aspirasi yang sering disampaikan meliputi pembangunan tanggul permanen, peninggian jalan lingkungan, normalisasi saluran air, serta perbaikan drainase.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat. Warga tidak hanya menerima informasi mengenai pembangunan desa, tetapi juga dapat menyampaikan kritik, saran, dan usulan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan seperti kerja bakti lingkungan, pembangunan tanggul sementara, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik.

Partisipasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menerapkan prinsip pembangunan partisipatif. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih menghadapi keterbatasan karena keputusan akhir mengenai prioritas pembangunan tetap berada di tangan pemerintah desa dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

### **Akomodasi Kepentingan Warga Terdampak Banjir**

Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan warga terdampak banjir telah diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan Desa Sukamekar. Hal ini terlihat dari masuknya berbagai usulan terkait penanganan banjir ke dalam agenda musyawarah desa maupun dokumen perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan pihak pemerintah desa berikut ini:

“Semua usulan warga terkait banjir tetap dicatat dan dibahas dalam Musyawarah pembangunan desa. Pemerintah desa juga berusaha melakukan Penanganan sementara seperti bikin tanggul darurat dan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten maupun BBWS.”

(Wawancara oleh Bapak TH selaku Sekretaris Desa pada 28 April 2026)

Pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan tanggul sementara menggunakan karung tanah, pembersihan saluran drainase, peninggian jalan lingkungan, serta pemberian bantuan kepada warga terdampak banjir. Selain itu, pemerintah desa juga aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan tanggul permanen dan normalisasi sungai.



Gambar 1

Tanggul sementara di salah satu titik banjir

Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya pembangunan tanggul sementara di beberapa titik rawan banjir. Keberadaan tanggul tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah desa berusaha merespons kebutuhan masyarakat meskipun masih dalam bentuk penanganan darurat. Temuan ini diperkuat oleh studi dokumentasi RPJMDes yang menunjukkan bahwa permasalahan drainase dan saluran air telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa.

Namun demikian, akomodasi kepentingan masyarakat belum sepenuhnya terakomodir oleh pemerintah desa. Banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran desa dan keterbatasan kewenangan pemerintah desa. Penanganan banjir secara permanen masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan BBWS.

### **Analisis Tingkat Partisipasi Berdasarkan Teori Tangga Partisipasi Arnstein**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat Desa Sukamekar dapat dianalisis menggunakan Teori Tangga Partisipasi Arnstein. Partisipasi masyarakat tidak lagi berada pada tingkat manipulation maupun therapy karena masyarakat telah diberikan kesempatan untuk hadir, berdiskusi, dan menyampaikan aspirasi dalam forum musyawarah

pembangunan. Pemerintah desa juga menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terdampak banjir.

Hal ini sejalan dengan karakteristik teori tangga partisipasi Arnstein, Partisipasi masyarakat telah mencapai tingkat informing (penyampaian informasi), yaitu tahap di mana masyarakat menerima hak untuk mendengar informasi dari pemerintah tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik. Pada tahap ini, pemerintah desa menyampaikan informasi pembangunan melalui musyawarah dan media komunikasi lainnya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mencapai tingkat consultation (konsultasi) sebuah tingkatan yang lebih tinggi di mana masyarakat mulai diberikan ruang suara untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan atau memberikan masukan atas solusi yang ditawarkan. Lebih jauh, keterlibatan tokoh masyarakat, BPD, serta perwakilan warga terdampak banjir dalam proses musyawarah menunjukkan adanya karakteristik placation (penenteraman), pada tingkat placation ini masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi mulai memiliki kesempatan untuk memengaruhi pembahasan pembangunan desa melalui perwakilan yang ditunjuk, meskipun keputusan akhir mutlak masih berada di tangan birokrasi atau pemerintah desa.

Penelitian juga menemukan indikasi menuju tingkat partnership. Hal ini terlihat dari kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penanganan banjir, pembangunan tanggul sementara, kerja bakti lingkungan, serta pengawasan pembangunan desa. Hubungan yang terbentuk menunjukkan adanya pola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat belum mencapai delegated power maupun citizen control. Masyarakat belum memiliki kewenangan dominan dalam menentukan prioritas pembangunan maupun pengelolaan anggaran desa. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah desa dan dipengaruhi oleh struktur kewenangan pemerintahan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat Desa Sukamekar dapat dikategorikan berada pada tingkat degrees of tokenism, khususnya consultation dan placation, dengan kecenderungan menuju partnership.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Sukamekar telah berlangsung melalui berbagai forum musyawarah yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga desa. Warga terdampak banjir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan, khususnya terkait penanganan banjir. Pemerintah desa telah berupaya mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui penyediaan ruang partisipasi, penyusunan prioritas pembangunan, pembangunan tanggul sementara, perbaikan drainase, serta koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian, keterbatasan kewenangan dan keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan.

Berdasarkan Teori Tangga Partisipasi Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat Desa Sukamekar berada pada kategori degrees of tokenism yang didominasi oleh tingkat consultation dan placation, dengan kecenderungan menuju partnership. Masyarakat telah memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pembangunan, tetapi

belum memiliki kekuasaan yang dominan dalam menentukan keputusan pembangunan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pustaka yang berupa judul buku**

Eko, S. (2014). *Desa membangun Indonesia*. Sleman: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (M. D. Mudzakir, Penerjemah). Jakarta: Rajawali Pers.

### **Pustaka yang berupa jurnal ilmiah**

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084>

Nugraheni, I. L., & Pargito. (2025). Kebijakan berbasis partisipasi masyarakat untuk mitigasi bencana banjir rob di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(1), 59–74.